

## Tanggungjawab Pembasmian Korupsi

Oleh Gatut Priyowidodo, Ph.D

Sekalipun tergolong kejahatan level luarbiasa (*extraordinary crime*), gaung kampanye anti korupsi sepertinya tidak terlalu nyaring digemakan gereja. Bahkan sebagai sebuah kekuatan *civil society*, peran strategis tersebut nyaris kalah seksi dengan trilogi misi gereja. Pada saat yang sama, satu per satu aparaturnegara yang kebetulan adalah warga gereja harus diseret sebagai pesakitan karena sangkaan atau dakwaan sebagai pelaku korupsi. Pertanyaannya lalu dimana gereja secara optimal bisa menjalankan tugas-tugas cegah tangkal perilaku koruptif tersebut?

### Tugas Berat

*Tagline* provokatif, gereja antikorupsi, koruptor wajib dihukum mati, mungkin tidak terlalu akrab disuarakan gereja dalam keseharian. Tapi percayalah, sejatinya gereja tidak pernah tinggal diam dan berpangku tangan untuk terus menyerukan hidup lurus sejalan dengan kehendak Tuhan. Korupsi dengan segala praktik derivatifnya termasuk kategori pelanggaran berat. Satu larangan dalam dasa perintah, sudah terang benderang, jangan mencuri. Tidak perlu tafsir hermeneutic apapun, instruksi itu sudah amat jelas. Yang menyedihkan, manusia kerap kali membuat sesuatu yang jelas menjadi seolah-olah tidak tampak, kabur lalu samar-samar. Di situlah, permulaan persekongkolan terang versus gelap bertemu nasib.

Siapa yang menang? Laga kebaikan lawan kejahatan adalah tanding skuad yang sama-sama powerful dan berkelanjutan. Tidak dikenal istilah *timeout*. Itu sebabnya, gereja tidak bisa dipersalahkan jika kemudian, satu atau dua atau berapapun yang akhirnya terjungkal dan masuk penjara. Sebagai kekuatan institusional, ia tidak bisa mengawal dan mengontrol sepanjang masa. Namun tidak pula bisa diartikan gereja cuci tangan.

Kisah Gehazi (2 Raja-raja 5), staf ahli kantor kenabian Eliza adalah contoh riil. Gehazi bukannya tidak mengerti, apalagi tidak paham. Sebagai staf ahli senior, ia menilai penolakan Eliza atas pemberian Panglima Perang Aram, Naaman tidak berkategori gratifikasi. Sebab itu ia tidak setuju, jika melalui pemberian sejumlah barang kemudian, akan mengurangi netralitas apalagi mereduksi otoritas kerohanian bosnya. Diam-diam ia mengejar rombongan Naaman agar pemberian itu jangan dibawa balik pulang, tapi diserahkan kepadanya untuk diteruskan kepada Eliza. Masih kata Gehazi, bosnya malu menerima hadiah, ia disuruh mengejar dan mengambilnya.

Kisah lain diceriterakan pada dalam Kisah Para Rasul 5:1-11 yang menceritakan kisah Ananias dan Safira. Dihadapan para Rasul, justru mereka bersekongkol untuk tidak secara jujur mengakui hasil penjualan tanahnya. Suami-isteri tersebut sengaja ingin mengurangi hak Tuhan demi kepentingan pribadinya. Akibatnya mereka tewas hanya hitungan sesaat saja ketika bersikukuh menyembunyikan fakta yang sebenarnya.

Pesan moral cerita klasik itu hendak mengatakan bahwa bergaul akrab dengan orang kudus, di territorial yang amat rohani ternyata tetap tidak steril dari perilaku hipokripsi. Tampang alim, hati malingpun bisa menimpa siapapun. Itulah tugas berat yang diemban gereja. Hari minggu tampak bersih, uluk salam kiri kanan tetapi apa yang terjadi sepekan kedepan tak ada yang tahu. Itulah beratnya menjadi terang, dalam situasi apapun gelap tidak boleh diberi kesempatan menyergap.

### **Instrumen Pembener**

Epikorus, seorang filsuf Athena (341 SM-271 SM) yang terkenal dengan ajarannya Epokorisme menyatakan bahwa kebahagiaan hidup adalah kenikmatan. Kenikmatan adalah keadaan negative tidak ada rasa sakit dan kegelisahan hidup. Kenikmatan inderawi penting, tetapi lebih penting ketenangan jiwa atau *antiaraxia*. Imajinasi setiap insan tentunya adalah hidup bahagia dalam kenikmatan. Tetapi yang kerap terabaikan atau sengaja dilalaikan adalah bagaimana menuju situasi tersebut.

Manusia sering silau dengan hasil akhir bukan proses bagaimana mendapatkan hasil akhir tersebut. Apa yang diprotret Epikorus ribuan tahun silam di Yunani, sejatinya adalah realitas kekinian. Mental menerabas, seolah menjadi instrumen pembener praktik-praktik hidup dalam penyimpangan. Rohaniwan apakah itu pendeta, pastur atau ulama lainnya barangkali sudah berbusa-busa mengingatkan tentang 'sejatining urip' atau hakekat hidup, tetapi itu kerap kalah dengan nafsu kedagingan.

Kebendaan adalah artefak yang bisa dilihat dan disentuh. Itu sebabnya ia lebih memikat karena menawarkan kemudahan untuk memuaskan hasrat kedagingan. Maka meski harus melanggar aturan, jika hasil akhirnya lebih menjanjikan kecenderungan manusia pasti memilih itu. Maka sangat tidak mengherankan bila data KPK yang melakukan pelanggaran setiap tahun tidak kunjung turun. Per 31 Januari 2015, di tahun 2015 ini KPK melakukan penyelidikan 14 perkara, penyidikan 5 perkara, penuntutan 4 perkara, inkracht 0 perkara, dan eksekusi 2 perkara. Total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2004-2015 adalah penyelidikan 679 perkara, penyidikan 416 perkara, penuntutan 326 perkara, inkracht 283 perkara, dan eksekusi 297 perkara.

Artinya melalui data tersebut, dapat dibaca bahwa perlaku tamak manusia itu makin hari justru makin tidak terbendung lagi. Sudah dibuatkan aturan dan panduan untuk

hidup dalam koridor tertib hukum, pelanggaran tetap pula jamak dilakukan. Setiap lini hidup sejauh mata bisa menjangkau, sejatinya kita terus-menerus berpapasan dengan perilaku-perilaku tidak terpuji tersebut. Pertanyaannya, opsi mana yang mesti kita pilih. Larut dengan tindakan koruptif yang menjanjikan hidup dalam kenikmatan atau memilih hidup dalam kenikmatan dengan kesehatan dan kebenaran? Kekristenan sebetulnya bukan doktrin optional. Tetapi agama yang mengajarkan kejelasan dalam bersikap. Jangan berdusta atau jangan mencuri, apakah perintah itu kurang jelas atau perlu tafsir ulang? Saya kira sangat jelas. Yang menjadi soal adalah ketika pada situasi tertentu manusia dihadapkan pada pilihan yang sulit dan dilematis. Disitulah ketahanan iman diuji, seberapa teguh komitmen itu mesti dipatuhi.

Ketika individu anggota keluarga bertabiat klepto (maling), sejatinya gereja tidak bisa menafikan dan lepas tangan. Miniatur gereja adalah keluarga, maka baik secara institusional atau persekutuan, wajib hukumnya gereja secara intensif terpanggil pula untuk tugas-tugas cegah tangkal dalam praktik-praktik kampanye anti korupsi. Seberapa mampu gereja menjalankan tugas tersebut, tidak ada standar yang pasti karena kemampuan dan prioritas kepentingan gereja juga beragam. Paling tidak langkah itu menjadi penting dalam konteks merekonstruksi sinkronisasi antara kepentingan mewujudkan *clean and good government* di satu sisi dan tumbuhnya kesadaran yang sama yang berasal dari inisiasi kekuatan masyarakat. Garam itu semakin bermakna bila ia larut dalam adonan, bukan terpisah atau memisahkan diri.

**\*Gatut Priyowidodo, Ph.D Ketua PKKP (Pusat Kajian Komunikasi Petra) dan Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi UK Petra Surabaya. email: gatpri@petra.ac.id**